

KOORDINASI PELAKSANAAN PENERTIBAN JEMBATAN BARELANG KOTA BATAM

ZULIA ERVANI
DAN
CHALID SAHURI

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam,
Pekanbaru 28293

e-mail: jujoe_assyfah@rocket.mail

Cp : 085668737754

Abstract: Coordination of Implementation Barelang Bridge Demolition in Batam City. This Research aims to identify and analyze Coordination of Implementation Barelang Bridge Demolition it. And then This Research can know and analyze the factors that affect the coordination of policing Barelang bridge. This Research is a descriptive qualitative where data collection is done with the snowballing sampling technique and incidental sampling. The results showed that Coordination of Implementation Barelang Bridge Demolition does not go well or these are still many problems that arise in its implementation. The factors that affect the coordination of enforcement among other factors Barelang Bridge managerial hierarchy, rules or procedures, planning , Goal Setting and leadership. These four factors greatly affect the coordination of policing Barelang bridge.

Abstrak : Koordinasi Pelaksanaan Penertiban Jembatan Barelang Kota Batam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan koordinasi pelaksanaan penertiban Jembatan Barelang dan mengetahui serta menganalisis faktor yang mempengaruhi koordinasi pelaksanaan penertiban Jembatan Barelang. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dimana pengambilan data dilakukan dengan teknik *snowballing sampling* dan *incidental sampling*. Hasil penelitian menunjukkan koordinasi yang dilakukan dalam penertiban Jembatan Barelang tidak berjalan dengan baik dengan kata lain masih banyak permasalahan yang muncul dalam pelaksanaannya. Adapun faktor yang mempengaruhi koordinasi penertiban Jembatan Barelang antara lain faktor hirarki manajerial, aturan dan prosedur, rencana dan penetapan tujuan serta pimpinan. Keempat faktor tersebut sangat mempengaruhi dalam koordinasi pelaksanaan penertiban Jembatan Barelang.

Kata kunci : Koordinasi, Pelaksanaan, Penertiban Jembatan Barelang

PENDAHULUAN

Kemajuan suatu kota dapat dilihat dari pembangunannya, baik pembangunan dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, administrasi serta pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana jalan. Pembangunan yang dilakukan daerah juga didukung dengan dikeluarkannya UU No.32 tahun 2004 tentang otonomi daerah. Sebagai kota industri pemerintah Kota Batam harus menjawab empat tantangan besar dalam pembangunan kota yaitu, tantangan sosial, tantangan ekonomi, tantangan sarana dan prasarana kota, tantangan pengelolaan tata pemerintahan. Untuk menjawab keempat tantangan ini maka dirumuskan visi dan misi dari Kota Batam. Visi dari Kota Batam dirumuskan dengan “Kota Batam sebagai bandar dunia madani yang modern dan menjadi andalan pusat pertumbuhan perekonomian nasional”.

Dalam mendukung visi Kota Batam maka infrastruktur dilakukan untuk meningkatkan daya saing Batam sebagai tujuan investasi bagi investor global. Dalam rangka mempercepat arus investasi Otoritas Batam membangun Jembatan Bareleng yang berfungsi sebagai jalan penghubung antara Pulau Batam, Rempang, dan Galang dengan tujuan ketika investasi di Pulau Batam sudah penuh maka desakan investasi dapat disalurkan ke pulau-pulau di sepanjang yang terhubung dengan Jembatan Bareleng.

Keberadaan jembatan ini juga menjadi daya tarik yang tinggi sebagai objek wisata serta merupakan ikon pemerintahan kota Batam dengan banyak wisatawan asing maupun dalam negeri datang ke Batam meningkat dari tahun ketahun hanya untuk berwisata. Hal ini berdampak positif dalam meningkatkan perekonomian kota Batam dengan adanya restoran-restoran seafood dan pedagang yang berjualan di sekitar objek wisata maupun diatas Jembatan Bareleng. Dalam rangka mengupayakan kelestarian lingkungan hidup yang serasi, harmonis, tertib, teratur dan tentram guna mendukung pelaksanaan pembangunan kota yang berkelanjutan maka salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah menciptakan ketertiban umum. Dalam hal ini pemerintah kota mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Batam No.16 Tahun 2007 tentang ketertiban umum.

Dalam pelaksanaan Penertiban Jembatan Bareleng, pihak terkait dalam penertiban jembatan Bareleng adalah Pemerintah kota yang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan ketertiban umum, Badan Pengusahaan Kota Batam sebagai pemilik aset Jembatan Bareleng, Satuan Polisi Pamong Praja, Direktorat Pengamanan BP Batam, Satuan Lalu Lintas Polresta Bareleng, dan Pasukan inteligent Yonif 134/TS.

Dalam pelaksanaan penertiban terdapat masalah dalam pelaksanaan koordinasi Jembatan Bareleng Kota Batam dimana kurangnya sinergitas kerja sama yang dilakukan antara Pemerintah Kota Batam dengan Badan Pengusahaan Kota Batam sehingga adanya tarik ulur kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Kurangnya komunikasi antara pihak pemerintah kota selaku koordinator penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat berkoordinasi dengan Badan Pengusahaan kota Batam dan Direktorat keamanan

juga membuat koordinasi kurang berjalan dengan baik. Sehingga berdampak pada pelaksanaan penertiban Jembatan Bareleng yang kurang maksimal. Kurang harmonisnya hubungan kerja antara pemerintah kota dengan Badan Pengusahaan Kota Batam dalam pelaksanaan ketertiban umum.

Dalam hal ini penertiban yang dilakukan belum maksimal sehingga fungsi Jembatan Bareleng tidak sesuai dengan tujuan utama Jembatan Bareleng sebagai Jembatan penghubung antar pulau sekitar Pulau Batam dalam rangka mempercepat laju investasi. Penelitian ini kerangka berfikir berdasarkan teori koordinasi Hasibuan tahun 2006 dengan indikator seperti pembagian tugas, disiplin, komunikasi, dan kesatuan tindakan. Untuk faktor yang mempengaruhi koordinasi penertiban Jembatan Bareleng berdasarkan pada penelitian yang ditemukan dilapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis koordinasi pelaksanaan penertiban Jembatan Bareleng dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi koordinasi penertiban Jembatan Bareleng Kota Batam.

METODE

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan teknik wawancara dan observasi dengan menggunakan kunci informan sebagai narasumber, kunci informan dalam penelitian ini adalah Walikota Batam dan melalui metode snowballing dan incidental sampling diperoleh informan susulan. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dari pihak atau orang yang memang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti, dan apabila dalam proses pengumpulan data sudah tidak ditemukan lagi variasi informasi, maka proses pengumpulan informasi sudah dianggap selesai.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yakni data primer dan data sekunder sesuai dengan klasifikasi atau pengelompokan informasi atau data yang telah diperoleh. Data primer yaitu data yang peneliti dapatkan dari responden atau sumber pertama berupa informasi-informasi yang belum diolah berupa hasil wawancara dengan pihak Badan Pengusahaan kota Batam, Walikota kota Batam, Direktur pengamanan aset, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Sat Lantas, Passintel Yonif 134/TS dan, dinas kebersihan kota Batam. Data skunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli, memuat informasi data tersebut. Data tersebut berupa sejarah berdirinya jembatan barelang, jumlah wisatawan yang masuk ke Batam dan upaya serta program pemerintah dalam penertiban pengunjung serta data-data yang dianggap perlu dan relevan dengan penelitian ini.

Untuk menghimpun data-data yang dibutuhkan, ada beberapa teknik yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu: Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung objek penelitian dan mencatat beberapa hal-hal penting yang berhubungan dalam kebijakan penertiban Jembatan Bareleng. Wawancara atau interview yaitu pengumpulan data mengandalkan serangkaian wawancara, berdialog, atau tanya jawab langsung pada responden. Responden berasal dari Walikota Batam, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Badan Pengusahaan, Sat Lantas, Passintel Yonif 134/TS, pegawai Direktur Pengamanan Aset, pegawai Satpol PP, pegawai Dinas Perhubungan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana penelitian ini dikaji secara deskriptif, artinya penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan secara jelas dan terperinci mengenai masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada didukung dengan dilakukannya wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait. Kemudian data-data tersebut dianalisis sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan secara deskriptif pula.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan penertiban Jembatan Bareleng Kota Batam merupakan salah satu bentuk dari implementasi Peraturan Daerah Kota Batam No. 16 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Meskipun Jembatan Bareleng merupakan aset pemerintah pusat yang diberikan kepada Badan perusahaan Kota Batam yang mempunyai kewenangan dalam menjaga dan merawat jembatan, namun dalam aktifitas yang terjadi di atas Jembatan Bareleng menjadi merupakan masalah pemerintah kota. Dalam koordinasi pelaksanaan penertiban Jembatan Bareleng Kota Batam dilibatkan beberapa SKPD/instansi terkait yang ditunjuk oleh Walikota Batam dalam rapat musyawarah pimpinan daerah (MUSPIDA).

Adapun pihak yang terkait dalam koordinasi penertiban Jembatan Bareleng Kota Batam yaitu Dinas Perhubungan Kota Batam, Badan Perusahaan kota Batam, Sat. Lantas Polresta Bareleng, Yonif 134/TS, Direktorat Keamanan BP Batam, Satuan Polisi Pamong Praja dan seluruh SKPD Kota Batam. Pihak-pihak terkait tersebut harus memiliki kemampuan dalam mengerjakan pekerjaan, memiliki tanggung jawab dan memiliki strategi yang bisa diterapkan. Dalam hal pelaksanaan penertiban Jembatan Bareleng salah satu faktor implementasi dari Peraturan Daerah Kota Batam No 16 tahun 2007 yang diterapkan adalah adanya koordinasi yang baik, dimana dengan adanya koordinasi pelaksanaan penertiban Jembatan Bareleng berjalan dengan baik sesuai tujuan yang sudah direncanakan.

Pemerintah Kota Batam dalam menciptakan ketertiban umum di atas Jembatan Bareleng adalah kewenangan Walikota Batam, melalui Sekretaris Daerah yang merupakan perpanjangan dari walikota dalam pelaksanaan penertiban jembatan Bareleng. Sekretaris Daerah berkoordinasi secara horizontal kepada kepala Badan Perusahaan Kota Batam, Sat. Lantas Polresta Bareleng, Yonif 134/TS, dan berkoordinasi kepada bawahannya secara vertikal kepada Satpol PP dan Direktorat Pengamanan BP Batam.

Bentuk pelaksanaan koordinasi antara Badan pengusaha kota Batam, Dinas Perhubungan, Sat.Lantas, Yonif 134/TS, Satpol PP dan Direktorat Pengamanan BP Batam yaitu, melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak memarkirkan kendaraan diatas Jembatan Bareleng dengan bentuk, plank pringatan, slogan, baliho. Dalam pelaksanaan penertiban Jembatan Bareleng di bentuk tim gabungan penertiban Jembatan Bareleng yang di utus oleh Walikota Batam melalui Sekertaris Daerah penertiban Jembatan Bareleng pada hari-hari besar seperti lebaran umat muslim, natalan, dan juga tahun baru sebagai bentuk kerja sama tim kerja untuk turun kelapangan menertibkan aktifitas lalu lintas di atas Jembatan Bareleng dan wisatawan serta para pedagang kaki lima.

Koordinasi dalam penelitian ini didefinisikan sebagai pengaturan tata hubungan dari usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha pencapaian tujuan bersama pula. Koordinasi sangat dibutuhkan oleh setiap instansi, sebab tanpa adanya koordinasi instansi cenderung melakukan kegiatan yang sama dengan instansi lainnya tanpa adanya pengarahan, yang akhirnya pekerjaan yang dilakukan hanya akan sia-sia dan tujuan yang diharapkan bersama tidak tepat sasaran bahkan tidak terlaksana dengan baik. Untuk itu koordinasi sangat dibutuhkan untuk mendukung kinerja instansi satu dengan yang lainnya.

Adapun manfaat koordinasi yang baik dalam suatu organisasi yaitu, antara lain:

1. Dapat terhindar dari perasaan atau pendapat saling menyalahkan jika tidak mencapai tujuan yang telah direncanakan
2. Dapat terhindar adanya tumpang tindih kewenangan dan kesamaan kerja, sehingga kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing organisasi.
3. Terhindar dari kurangnya tingkat kesadaran diantara bagian untuk saling bekerjasama
4. Koordinasi yang baik dapat menjamin adanya kesatuan langkah antar bagian

Adapun bentuk koordinasi dari pihak Badan pengusaha kota Batam dengan Direktorat keamanan sebagai pemilik aset yaitu melakukan patroli setiap hari mulai dari jembatan 1 hingga ke jembatan 6, dan melakukan negosiasi kepada para pedagang untuk tidak memakirkan gerobak jualannya diatas jembatan, dan serta membuat kesepakatan untuk saling menjaga jembatan dengan membersihkan sampah diatas Jembatan Bareleng.

Pembagian Kerja

Dalam koordinasi penertiban Jembatan Bareleng sangat penting setiap personil mengetahui tugas masing-masing dalam hal ini adanya pembagian tugas antara anggota Direktorat Pengamanan, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Sat.Lantas dan Yonif 134/TS dan adanya pengetahuan pembagian tugas yang sesuai dengan kemampuan dan bidangnya. Agar setiap anggota saling berkoordinasi mengetahui tugasnya masing-masing harus dibekali dengan perincian tugas secara jelas. Perincian tugas dalam artinya terdapat pedoman tugas bagi anggota sehingga dapat bertindak secara cepat. Perincian tugas diperlukan untuk supaya setiap anggota yang melakukan pekerjaan tahu dengan apa yang harus dikerjakan sehingga pekerjaan berjalan dengan efektif.

Pihak terkait penertiban Jembatan Bareleng sudah mempunyai pedoman dalam menjalankan tugasnya. Pedoman ini berupa Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2013 dan keputusan Ketua Badan Pengusaha Kota Batam yang mengatur tugas, fungsi, dan kegiatan dalam menertibkan Jembatan Bareleng. Meskipun didalam Peraturan Daerah Kota Batam ketertiban umum adalah tugas dari Satpol PP namun lembaga ini dapat bekerja sama dengan Direktorat Pengamanan karena tugas dari Direktorat Pengamanan sebagai pengaman aset yakni bangunan

Jembatan Bareleng dan sepenuhnya aktifitas diatas Jembatan adalah kewenangan dari pemerintah Kota Batam. Dalam pelaksanaan penertiban Jembatan Bareleng terdapat adanya tarik ulur kewenangan atas pengelolaan Jembatan Bareleng antara Badan Pengusahaan Kota Batam sebagai pemilik kewenangan dalam pengelolaan Jembatan Bareleng sementara itu Pemerintah kota memiliki kewenangan terhadap aktifitas Jembatan. Dengan adanya tarik ulur kewenangan dan kurangnya hubungan kerjasama sehingga koordinasi tidak dapat berjalan dengan baik.

Pendelegasian sangat berpengaruh dalam koordinasi dengan adanya pendelegasian kewenangan koordinasi menjadi tepat sasaran baik dalam menyampaikan informasi maupun pembagian tugas sehingga anggota dapat menjalankan tugas sesuai dengan kemampuan dan yang telah diperintahkan begitu juga pimpinan dapat lebih mudah berkoordinasi dengan para pimpinan pihak terkait Jembatan Bareleng sesuai dengan laporan yang telah diberikan oleh bawahan. Dengan pendelegasi wewenang dan pembagian kerja kepada para bawahan maka setiap bawahan akan mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan wewenang yang diterimanya. Pendelegasian wewenang mempengaruhi atasan dan bawahan dalam melakukan pekerjaan dengan efektif setiap bawahan mengerjakan hanya sebagian dari pekerjaan instansi, karena itu masing-masing pekerjaan harus disatukan, diintegrasikan, dan diarahkan untuk tercapainya tujuan. Karena tanpa koordinasi tugas dan pekerjaan dari setiap anggota instansi tidak tercapai. Koordinasi ini merupakan tugas penting yang harus dilakukan oleh pimpinan dan tugas ini sangat sulit.

Setiap tugas yang diberikan tentunya ada pertanggung jawaban yang akan dilaporkan, yang dimaksud tanggung jawab adalah pertanggung jawaban atas kegiatan yang telah dilakukan. Berkaitan dengan pertanggung jawaban setiap instansi terkait penertiban Jembatan Bareleng kepada instansi masing-masing. Direktorat Pengamanan sebagai pengkoordinir kegiatan yang nantinya pertanggung jawabannya berupa laporan kepada pimpinan Direktorat pengamanan. setiap personil yang turun dilapangan dituntut untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pimpinannya masing-masing. Meskipun tim penertiban Jembatan Bareleng seperti tim terpadu namun surat keputusan Walikota untuk mengatur kegiatan secara struktur maupun uraian tugas secara formalitas tidak ada. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya pembagian tugas dalam koordinasi pelaksanaan penertiban Jembatan Bareleng sudah ada namun menemui beberapa kendala karena adanya tarik ulur kewenangan antara pemerintah kota dengan Badan Pengusahaan Kota Batam serta tanggung jawab dari kegiatan yang dilakukan oleh bawahan kepada atasan setiap pihak instansi terkait Jembatan Bareleng masing-masing membuat pembagian tugas hanya berdasarkan tupoksi masing tanpa ada kesepakatan bersama sebelumnya.

Disiplin

Koordinasi yang baik juga didukung dengan adanya kedisiplinan dari setiap personil dalam menjalankan tugas. Kedisiplinan diperlukan untuk mempercepat pencapaian tugas tanpa adanya kedisiplinan dalam setiap personil penertiban Jembatan Bareleng tidak dapat terlaksana dengan baik Kesadaran dan

kesediaan anggota dalam menjalankan tugas dapat mendukung koordinasi yang baik antara instansi terkait. Kesadaran akan tugas yang diberikan kepada Dinas Perhubungan, Direktorat Pengamanan, Satpol PP, Sat.Lantas serta Yonif 134/TS dan kesediaan untuk menjalankan tugas hal yang sangat dituntut untuk pencapaian tujuan. disimpulkan bahwa kesadaran setiap instansi untuk melakukan penertiban ada namun kurang didukung dengan adanya sinergitas antara pemerintah kota dan Badan perusahaan Kota Batam, sehingga kegiatan penertiban Jembatan Bareleng hanya sebatas tim gabungan untuk hari-hari besar saja.

Sejauh ini usaha yang dilakukan Walikota Batam selaku pihak pemerintah kota telah meminta untuk menyerahkan kewenangan Jembatan Bareleng yang merupakan aset pemerintah pusat dari Badan Perusahaan Kota Batam namun hasilnya belum ada kesepakatan antara Walikota dan Badan Perusahaan kota Batam dalam peralihan kewenangan atas pengelolaan aset terutama Jembatan Bareleng. ini merupakan masukan yang besar buat pemerintah kota dalam hal ini Walikota Batam dan Badan Perusahaan Kota Batam untuk mencari jalan yang terbaik dalam pelaksanaan penertiban Jembatan Bareleng sesuai keputusan bersama sehingga setiap pihak yang terkait dalam penertiban dapat menjalankan kewenangan sesuai kesepakatan yang telah disetujui bersama.

Ketepatan waktu dalam menertibkan Jembatan Bareleng sangat memberi manfaat yang lebih untuk keadaan Jembatan yang semakin tua umurnya. Kedisiplinan setiap personil penertiban Jembatan Bareleng yakni Dinas Perhubungan, Direktorat Pengamanan, Satpol PP, Sat. Lantas, Yonif 134/TS sangat dituntut untuk tepat waktu, bertindak cepat demi menjaga kekuatan Jembatan Bareleng. Sanksi yang diterapkan dalam menertibkan jembatan Bareleng, dapat mempermudah pelaksanaan koordinasi, baik sanksi yang diberikan bagi personil yang tidak turun kelapangan, dan sanksi kepada pelanggar penertiban jembatan Bareleng.

Dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa disiplin dalam penertiban Jembatan Bareleng sudah ada dalam setiap anggota lembaga pihak terkait penertiban Jembatan Bareleng karena tuntutan pekerjaan dan sanksi yang diberikan oleh setiap instansi yang bersangkutan. Namun dengan adanya dua lembaga yang sangat berpengaruh dalam pengelolaan Jembatan baik pihak pemerintah kota dengan Badan Perusahaan Kota Batam, sehingga pihak instansi terkait Jembatan Bareleng tidak bisa melakukan tindakan diluar batas kewenangan yang ada meskipun demikian ada termasuk peran pemerintah kota sebagai penyelenggara ketertiban umum

Komunikasi

Dalam pelaksanaa suatu koordinasi, sangatlah diperlukan suatu komunikasi yang lancar antara Dinas perhubungan, Satpol PP, Badan Perusahaan kota Batam, Direktorat pengamanan, Sat. Lantas, dan Yonif 134/TS agar terjalin suatu hubungan kerja sama yang harmonis guna kelancaran penertiban Jembatan Bareleng sesuai dengan keinginan bersama. Hal ini tentu tidak terlepas campur tangan Walikota sebagai koordinator pelaksanaan

penertiban dan Direktorat pengamanan sebagai koordinator lapangan untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga pihak-pihak terkait dapat bekerja dengan nyaman tanpa ada persaingan maupun diskriminasi lembaga.

Komunikasi dapat membantu pelaksanaan perencanaan yang telah dibuat oleh tim terpadu. Dari komunikasi ini diharapkan kepada pihak-pihak yang melaksanakan penertiban Jembatan Barelang mengerti akan tujuan dari perencanaan yang telah dibuat. Dimana komunikasi merupakan alat untuk memperlancar kegiatan pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh pihak terkait Jembatan Barelang. Di harapkan dengan adanya komunikasi ini dapat mengurangi kesalahpahaman dan kesamaan kerja yang dilakukan setiap anggota dan seluruh pihak terkait penertiban Jembatan Barelang harus mampu mengomunikasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan Perda No.16 tahun 2007 tentang penertiban umum.

Adapun komunikasi yang baik terdapat kejelasan tujuan dan informasi yang disampaikan baik melalui pertemuan maupun diskusi pihak terkait Jembatan Barelang. Pemecahan masalah dan evaluasi juga harus di komunikasi dengan baik dan jelas sehingga dalam mencari solusi penertiban jembatan Barelang dapat teratasi dan tepat saran. Dengan adanya komunikasi dalam pemecahan masalah memberikan perubahan dari aktivitas yang dilakukan di atas Jembatan Barelang sehingga kegiatan tersebut tidak dilakukan terus menerus dengan kondisi yang sama tanpa adanya perubahan setiap tahunnya.

Dalam koordinasi dibutuhkan rapat yang merupakan tempat penyatuan tugas bersama yang akan dilakukan. Rapat dapat digunakan sebagai pengevaluasi. Pelaksanaan jadwal rapat penertiban Jembatan Barelang penting dilakukan dalam artinya pelaksanaan rapat yang berjalan terus menerus dengan waktu-waktu yang telah ditetapkan yang berguna bagi terciptanya koordinasi yang baik dan melibatkan seluruh unsur yang terkait. Rapat koordinasi sangat penting sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan pendapat-pendapat yang berbeda, sehingga koordinasi yang baik didalamnya harus ada rapat koordinasi untuk menentukan langkah dan tindakan apa yang harus dilakukan sesuai kesepakatan bersama tanpa adanya komunikasi yang jelas koordinasi tidak akan berjalan dengan baik. salah satu alternatif dalam berkomunikasi bisa berbentuk rapat baik formal maupun informal sehingga kegiatan yang dilakukan tepat sasaran dan tidak mengulang kegiatan yang sama

Pada indikator komunikasi belum berjalan dengan maksimal. Dikarenakan masih kurangnya komunikasi yang dilakukan pihak terkait penertiban Jembatan Barelang. Perbedaan tugas dan kewenangan instansi membuat komunikasi berkurang sehingga jalannya koordinasipun tidak begitu efektif dalam menyampaikan informasi, memecahkan masalah, serta evaluasi kegiatan yang telah dilakukan. Penyampaian informasi hanya bersifat lisan tanpa adanya diskusi ataupun pertemuan-pertemuan untuk membahas masalah dan penetapan rencana kedepan lebih lanjut.

Komunikasi yang baik dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan agar informasi yang disampaikan tepat sasaran. Kurangnya komunikasi dalam penyampain informasi sangat berpengaruh dalam pelaksanaan koordinasi

Meskipun penertiban Jembatan Bareleng secara terpadu bersifat sementara namun komunikasi secara langsung diantara sesama pegawai sangatlah penting untuk menghindari banyaknya ketidakefektifan kerja karena kurangnya kesediaan untuk selalu berkomunikasi menimbulkan kendala dalam pelaksanaan tugas menjadi bertambah berat yang seharusnya pekerjaan dapat dipecahkan jika pegawai bersedia untuk bertemu langsung membicarakan masalah-masalah yang ada.

Kesatuan Tindakan

Kesatuan tindakan adalah penyatuan tindakan yang diatur oleh pimpinan untuk menciptakan keserasian dalam mencapai suatu tujuan. Hal ini bisa dilihat dari tanpanya adanya kesatuan tindakan antara bagian yang bertugas, usaha pelaksanaan penertiban jembatan Bareleng akan sulit dilakukan. Jika ada sesuatu yang dilakukan oleh Direktorat Pengamanan maka Satpol PP, Sat Lantas dan Yonif 134/TS juga sama .

Dalam suatu kegiatan perlu adanya kerjasama yang saling pengertian dari setiap personil instansi yang terkait dalam penertiban Jembatan Bareleng baik berupa koordinasi melalui kewenangan, pedoman kerja forum. Dalam mencapai penertiban jembatan Bareleng sesuai fungsi jembatan sebagai jalan penghubung diperlukan kerjasama yang baik. meskipun koordinasi telah dilakukan dalam rangka saling menghargai lembaga dan kewenangan masing-masing instansi namun penertiban yang dilakukan kurang tepat sasaran karena keterbatasan ruang lingkup kewenangan. Hubungan kerjasama dengan saling pengertian akan lebih baik lagi apabila dilakukan dengan tindakan-tindakan yang selaras artinya tindakan yang selaras merupak faktor penting untuk menyatukan tindakan.

Tindakan yang selarasa merupakan berbagai kergiatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan maupun pedoman yang telah ada. Tanpa adanya keselarasan dalam bekerja sama maka kesatuan tindakan tidak akan terwujud dan akhirnya tujuan yang telah direncanakan tidak tepat sasaran dikarenakan adanya kesamaan kerja dalam mencapai tujuan.

Untuk mencapai tindakan yang selaras dan kesatuan tindakan setiap anggota instansi yang berkaitan dituntut untuk saling bekerja sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, namun harus saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Tindakan selaras dan kesatuan tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan penertiban Jembatan Bareleng belum berjalan dengan baik. meskipun saat turun kelapangan mengutamakan profesionlitas namun tetap saja dalam melaksanakan tugas sesuai dengan surat perintah yang diturunkan oleh Walikota Batam, karena setelah melaksanakan tugas setiap instansi terkait penertiban kembali menjalankan tugas instansi masing-masing. Sehingga yang melanjutkan penertiban Jembatan Bareleng hanya pihak Direktorat Pengamanan Badan Pengusahaan Kota Batam. Maka dapat disimpulkan tindakan selaras antara pihak terkait penertiban Jembatan Bareleng tidak ada. Setiap personil lepas tangan dan kembali untuk menjalankan tugas lembaga setelah penertiban dilakukan berdasarkan ketetapan waktu yang telah diperintahkan.

Anggota setiap instansi dituntut untuk dapat menyesuaikan diri terhadap tugas sehingga kegiatan yang dilakukan dapat saling mendukung. Tanpa adanya penyesuaian diri terhadap tugas tujuan yang telah direncanakan tidak dapat tercapai karena setiap anggota memiliki tingkatan kewenangan yang berbeda-beda, jabatan yang berbeda-beda sehingga penyesuaian harus dilakukan baik terhadap tugas, teman kerja maupun kondisi lokasi penertiban Jembatan Barelang.

Jika demikian maka tidak ada rapat koordinasi yang menetapkan tugas masing-masing sesuai kesepakatan dalam penertiban Jembatan Barelang. karena dengan adanya rapat koordinasi merupakan alat untuk menyatukan semua tindakan yang berbeda-beda tugas menjadi satu untuk mencapai tujuan. Dalam pelaksanaan penertiban Jembatan Barelang semua informasi disampaikan secara lisan dan bersifat sementara sehingga kesatuan tindakan dalam menjalankan penertiban Jembatan Barelang tidak ada karena setiap anggota berpedoman sesuai dengan tugas masing-masing tanpa ada penyatuan terhadap tugas-tugas dari instansi lain dan setelah penertiban selesai dilaksanakan dengan waktu yang diperintahkan maka setiap anggota kembali ke instansi masing-masing tanpa adanya evaluasi dan pemecahan masalah yang dilakukan oleh pihak terkait Jembatan Barelang. koordinasi pada intinya merupakan kesatuan tindakan, kesatuan usaha, penyesuaian antara bagian maupun sinkronisasi dan integrasi yang keselarasan kerja berdasarkan keselarasan. Atas dasa itu dapat dinyatakan bahwa kiranya azas koordinasi harus ada keselarasan aktivitas antara pihak terkait penertiban Jembatan Barelang serta keselarasan tugas antara pegawai dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Telah diketahui sebelumnya bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi pelaksanaan penertiban Jembatan Barelang. Setelah penulis melakukan serangkaian kegiatan yang berupa observasi dan wawancara, maka penulis akan memperjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi penertiban Jembatan Barelang. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi pelaksanaan penertiban Jembatan Barelang adalah sebagai berikut:

Hirarki Manajerial

Faktor yang sangat berpengaruh dalam koordinasi pelaksanaan penertiban jembatan Barelang hirarki manajerial baik dari hirarki fungsional, maupun struktural. Hirarki manajerial sangat mendukung jalannya sebuah koordinasi, karena penyampain informasi yang akurat dan jelas sangat dapat menciptakan koordinasi yang baik untuk itu perlu adanya hirarki manajerial baik struktural maupun fungsional. Meskipun penertiban Jembatan Barelang bersifat sementara namun harus tetap diperlukan sebuah rantai perintah, aliran informasi, tanggung jawab yang jelas dan lengkap sehingga tepat sasaran dalam pencapaian tujuan.

Aturan dan Prosedur

Pelaksanaan koordinasi yang melibatkan beberapa instansi mengakibatkan perlu adanya pedoman dan aturan sebagai petunjuk dalam mekanisme pekerja. Dimana instansi tersebut mempunyai tugas-tugas yang lain harus dikerjakan juga sehingga menyebabkan koordinasi yang dilakukan tidak berjalan dengan baik

Koordinasi yang bersifat sementara menjadikan penertiban Jembatan Barelang tidak menggunakan prosedur atau aturan kerja hanya saja dibutuhkan pengertian dari setiap masing-masing instansi yang terkait. Meskipun tanpa prosedur koordinasi dapat berjalan karena adanya kesadaran dari setiap anggota yang peduli akan kondisi Jembatan Barelang namun dengan hasil yang kurang maksimal. ini disebabkan adanya dua sistem kekuasaan yang masih terjadi di kota Batam antara Pemerintah Kota dan Badan Pengusahaan kota Batam.

Rencana dan tujuan

Salah satu faktor penentu koordinasi yang baik adalah rencana dan tujuan yang jelas. Dalam hal ini rencana dan tujuan dalam pelaksanaan penertiban jembatan Barelang. Rencana harus dibuat secara matang dan melihat arah kemasa yang akan datang. Koordinasi tidak akan terlaksana jika tujuan dan rencana yang ditetapkan tidak jelas, bahkan hanya sebatas perintah saja.

Rencana dan tujuan sangat berpengaruh dalam jalannya pelaksanaan koordinasi terbukti dengan kejelasan rencana merupakan awal dari setiap kegiatan dalam menentukan sasaran penertiban Jembatan Barelang, sarana dan prasana yang digunakan personil, SDM yang handal, dan anggaran dalam pelaksanaan penertiban jembatan Barelang. Tanpa adanya perencanaan yang jelas koordinasi pelaksanaan penertiban Jembatan Barelang tidak akan berjalan dengan baik.

Pimpinan

Dari hasil wawancara di lapangan peneliti menemukan bahwa pimpinan juga berpengaruh dalam melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait Jembatan Barelang. Tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan organisasi. Oleh karena itu, koordinasi merupakan tugas seorang pimpinan. Dalam penertiban Jembatan Barelang ada dua lembaga yang sangat berpengaruh yakni Pemerintah kota dan Badan Pengusahaan kota Batam. Koordinasi tidak akan berjalan jika kedua lembaga ini tidak melakukan kerjasama dengan baik. Adanya tarik ulur kewenangan antara Walikota selaku pemimpin pemerintah kota dan Badan Pengusahaan Kota Batam sehingga penertiban Jembatan Barelang dilakukan secara sementara karena kewenangan yang telah ada bahwa Badan Pengusahaan Kota Batam memiliki kewenangan dalam pengelolaan Jembatan Barelang secara fisik dan Pemerintah Kota memiliki kewenangan sebagai penyelenggara ketertiban umum sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004. Maka dengan adanya kewenangan atas satu objek pengamanan sehingga perlu adanya kesepakatan yang diambil oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu kerja sama merupakan suatu syarat yang sangat penting dalam membantu pelaksanaan koordinasi. Selain

kerjasama komunikasi yang baik antara pemimpin dengan pemimpin lembaga atau pimpinan dengan bawahan.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis data yang dilakukan terhadap data yang diperoleh dari lokasi penelitian dan kunci informan serta beberapa informan susulan dapat disimpulkan bahwa: Pelaksanaan koordinasi penertiban Jembatan Bareleng secara menyeluruh tidak berjalan dengan baik, pembagian tugas dalam koordinasi pelaksanaan penertiban Jembatan Bareleng sudah dilakukan namun menemui beberapa kendala karena adanya tarik ulur kewenangan antara pemerintah kota dengan Badan Pengusahaan Kota Batam serta tanggung jawab dari kegiatan yang dilakukan oleh bawahan kepada atasan setiap pihak instansi terkait Jembatan Bareleng masing-masing membuat pembagian tugas hanya berdasarkan tupoksi masing-masing tanpa ada kesepakatan bersama sebelumnya. Disiplin dalam penertiban Jembatan Bareleng sudah ada dalam setiap anggota lembaga pihak terkait penertiban Jembatan Bareleng karena tuntutan pekerjaan dan sanksi yang diberikan oleh setiap instansi yang bersangkutan. Namun dengan adanya dua lembaga yang sangat berpengaruh dalam pengelolaan Jembatan baik pihak pemerintah kota dengan Badan Pengusahaan Kota Batam, sehingga pihak instansi terkait Jembatan Bareleng tidak bisa melakukan tindakan diluar batas kewenangan yang ada meskipun demikian ada termasuk peran pemerintah kota sebagai penyelenggara ketertiban umum. pada indikator komunikasi belum berjalan dengan maksimal. Dikarenakan masih kurangnya komunikasi yang dilakukan pihak terkait penertiban Jembatan Bareleng. Perbedaan tugas dan kewenangan instansi membuat komunikasi berkurang sehingga jalannya koordinasipun tidak begitu efektif dalam menyampaikan informasi, memecahkan masalah, serta evaluasi kegiatan yang telah dilakukan. Dalam pelaksanaan penertiban Jembatan Bareleng semua informasi disampaikan secara lisan dan bersifat sementara sehingga kesatuan tindakan dalam menjalankan penertiban Jembatan Bareleng tidak ada karena setiap anggota berpedoman sesuai dengan tugas masing-masing tanpa ada penyatuan terhadap tugas-tugas dari instansi lain dan setelah penertiban selesai dilaksanakan dengan waktu yang diperintahkan maka setiap anggota kembali ke instansi masing-masing tanpa adanya evaluasi dan pemecahan masalah yang dilakukan oleh pihak terkait Jembatan Bareleng.

Faktor yang mempengaruhi koordinasi penertiban Jembatan Bareleng adalah hirarki manajerial yang hanya secara lisan tanpa adanya secara struktur maupun fungsional dalam pelaksanaan penertiban Jembatan Bareleng membuat alur informasi kurang jelas baik koordinator maupun yang dikoordinir, prosedur dan aturan dalam mekanisme penertiban Jembatan Bareleng berpengaruh dalam koordinasi pelaksanaan penertiban, tanpa adanya prosedur dan aturan kegiatan pembagian tugas dalam penertiban Jembatan Bareleng yang hanya bersifat sementara, pelaksanaan penertiban Jembatan Bareleng tidak tetap sasaran, dan terakhir kurangnya perencanaan dan tujuan dalam penertiban Jembatan Bareleng berpengaruh terhadap pelaksanaan koordinasi yang tidak berjalan dengan baik, tidak adanya sasaran yang jelas, sarana prasarana yang digunakan terbatas, dan anggaran dalam penertiban jembatan Bareleng yang tidak ada. Membuat

pelaksanaan koordinasi penertiban jembatan Bareleng bersifat sementara. Dari hasil wawancara di lapangan peneliti menemukan bahwa pimpinan juga berpengaruh dalam melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait Jembatan Bareleng. Tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan organisasi. Oleh karena itu, koordinasi merupakan tugas seorang pimpinan.

SARAN

Adanya komunikasi yang baik secara formal maupun internal tidak hanya berupa secara lisan namun komunikasi melalui pertemuan ataupun rapat sangat penting dalam suatu koordinasi sehingga setiap anggota mendapatkan informasi yang jelas dan pelaksanaan penertiban Jembatan Bareleng dapat tepat sasaran

Perlu adanya sinergitas dan hubungan kerjasama yang baik antara Pemerintah Kota dengan Badan Pengusahaan Kota Batam. Karena dua lembaga ini memiliki peran penting dalam pembangun kota Batam termasuk masalah penertiban Jembatan Bareleng. Meskipun Badan Pengusahaan Kota Batam berwenang hanya sebatas dalam menjaga aset tetapi kewenangan dalam ketertiban umum tetap kewenangan Pemerintah kota Batam. Untuk itu pembahasan masalah penertiban Jembatan Bareleng harus dikomunikasikan secara insentif dalam memecah masalahnya

DAFTAR PUSTAKA

- Budiyono. Amirullah Haris. 2004 . *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta; Graha Ilmu
- Handyaningrat, S. 2001. *Pengantar Suatu Ilmu Administrasi Dan Manajemen*, Gunung Agung, Jakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P. (2011). *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Gunung Agung.
- Herujito, Yayat M. 2001. *Dasar-dasar Manajemen*. PT. Grasindo: Jakarta
- Kencana, Inu S. 2001. *Dasar-dasar Manajemen*. PT. Grasindo: Jakarta
- Koontz Harold dan O' Donnell Cyril. 1998. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Bhatara: Jakarta
- Manullang. 2005. *Dasar- Dasar Manajemen*, Medan : Ghalia Indonesia
- Sutarto. 2002. *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Syamsi S.U, Ibnu. 1994. *Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen*, Jakarta: Rineka Cipta
- Rivai, 2005, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, Jakarta, Raja gratindo Persada.